



## Retorsi dalam Penyelesaian Sengketa Internasional: Studi Kasus terhadap Konflik Ekonomi AS dan Tiongkok

Rahma Fauzia Nabilla<sup>1\*</sup>, Salwa Diandra Aulia<sup>1</sup>, Wilda Malika Mufrihah<sup>1</sup>, Riani Sintia<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia

 [rahmafauzia3@gmail.com](mailto:rahmafauzia3@gmail.com)\*

### Abstract

The economic conflict between the US and China that began in 2018 employed tariff retaliation to pressure trade policies. This study aims to evaluate the effectiveness of retaliation in achieving economic and political objectives. A qualitative method with descriptive analysis was used to analyze trade data from the U.S. Census Bureau and USTR. Results show a 16% decline in US imports from China in 2019 and an increase in consumer prices. While retaliation protects domestic industries, its impacts include global supply chain disruptions and diplomatic tensions. In conclusion, retaliation effectively pressures trade but brings significant economic risks, requiring international cooperation for optimal outcomes. Retortion can protect domestic industry while also imposing an economic burden on consumers and producers. Apart from the direct economic impact, the retortion also affected diplomatic relations and political tensions between the two countries. Other case studies such as the European Union's sanctions against Russia show that the effectiveness of retortion depends greatly on the political and economic context of the targeted country

**Keywords:** US-China Trade War, Tarif Retaliation, Economic Impact

### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received

March 02, 2024

Revised

April 11, 2024

Accepted

April 30, 2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://www.attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang menciptakan keterkaitan ekonomi yang mendalam antar negara, sengketa internasional seringkali terjadi dan membutuhkan mekanisme penyelesaian yang efektif untuk menjaga stabilitas dan perdamaian global. Salah satu mekanisme yang kerap digunakan adalah retorsi, suatu tindakan yang diambil oleh negara sebagai balasan terhadap tindakan lain yang dianggap merugikan kepentingannya. Retorsi, yang didefinisikan dalam hukum internasional, adalah tindakan yang secara legal diizinkan sebagai respons terhadap pelanggaran oleh negara lain, biasanya bersifat ekonomi atau politik (Malcolm N. Shaw 2017). Konflik ekonomi yang meletus antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2018 adalah contoh nyata penggunaan retorsi dalam skala besar. Konflik ini bermula ketika Amerika Serikat, di bawah administrasi Presiden Donald Trump, mengenakan tarif tambahan terhadap barang-barang impor dari Tiongkok. Langkah ini diambil dengan tujuan melindungi industri dalam negeri dari apa yang disebut sebagai praktik perdagangan yang tidak adil oleh Tiongkok, serta memaksa Tiongkok untuk mengubah kebijakannya (Brown et al. 2005)

Respons Tiongkok terhadap tarif ini adalah dengan mengenakan tarif balasan terhadap impor barang dari Amerika Serikat. Tiongkok mengklaim bahwa tindakan ini adalah upaya untuk mempertahankan kepentingan ekonomi nasionalnya di tengah

tindakan yang dianggap sebagai agresi ekonomi oleh Amerika Serikat. Tarif balasan ini mencakup barang-barang dengan nilai perdagangan signifikan, yang menandakan eskalasi serius dalam konflik perdagangan antara kedua negara (Ministry of Commerce, China, 2018). Studi yang dilakukan oleh Peterson Institute for International Economics (PIIE) menunjukkan bahwa tarif yang diberlakukan oleh kedua negara telah mengurangi volume perdagangan bilateral dan mempengaruhi industri-industri tertentu, dengan beberapa industri mengalami penurunan produksi dan pekerjaan (Bown 2019). Lebih lanjut, analisis oleh Bank Dunia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa konflik tarif ini telah memperlambat pertumbuhan ekonomi global, menunjukkan betapa signifikannya dampak dari retorsi ini pada ekonomi lebih luas (The World Bank 2017).

Jika ditinjau pada perspektif hukum internasional, tindakan retorsi yang diambil oleh kedua negara ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan legalitas dalam konteks yang lebih luas. Menurut (Adekola 2019), meskipun retorsi diizinkan di bawah hukum internasional, penerapannya harus memenuhi kriteria proporsionalitas dan keadilan, serta harus melalui proses penilaian yang ketat untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional (Ardhiansyah 2022). Selain itu, retorsi juga membawa implikasi sosial dan politik yang penting. Studi oleh (Berthou et al. 2018) dalam *Rue de la Banque* journal menunjukkan bahwa kebijakan proteksionis dan tindakan memperburuk situasi perdagangan global. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada kedua negara yang terlibat tetapi juga pada ekonomi global, menciptakan ketidakstabilan di pasar internasional dan meresahkan investor serta pelaku bisnis di seluruh dunia.

Implikasi sosial dari retorsi ini juga penting untuk diperhatikan. Di Amerika Serikat, tarif telah meningkatkan biaya bagi konsumen dan mempengaruhi pekerjaan di beberapa industri yang sangat bergantung pada impor dari Tiongkok. Sementara di Tiongkok, industri yang bergantung pada ekspor ke Amerika Serikat mengalami penurunan permintaan yang signifikan, yang berdampak pada pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Analisis oleh Federal Reserve Bank of New York menunjukkan bahwa tarif telah menyebabkan peningkatan harga barang konsumsi di Amerika Serikat, yang menambah beban ekonomi bagi konsumen (Amiti, Redding, and Weinstein 2019). Dari perspektif politik, retorsi ini menunjukkan bagaimana kebijakan perdagangan dapat digunakan sebagai alat dalam politik luar negeri. Retorsi sering dijadikan sarana untuk mengirim pesan politik atau untuk memaksa perubahan dalam kebijakan atau perilaku negara lain. Namun, strategi ini juga menimbulkan risiko meningkatnya ketegangan dan eskalasi konflik, yang bisa berakibat pada kerusakan hubungan diplomatik yang lebih luas.

Dalam konteks ini, pertanyaan tentang efektivitas retorsi menjadi sangat relevan. Apakah retorsi efektif dalam mencapai tujuan politik dan ekonomi yang diinginkan, atau apakah retorsi cenderung memperburuk konflik tanpa menyelesaikan masalah yang mendasarinya? Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan ini dengan menganalisis kasus spesifik antara Amerika Serikat dan Tiongkok, memberikan penilaian yang objektif dan berdasarkan data tentang dampak retorsi terhadap ekonomi dan politik kedua negara serta efek yang lebih luas terhadap ekonomi global. Penting juga untuk mempertimbangkan konteks hukum internasional yang mengatur penggunaan retorsi. Menurut konvensi hukum internasional, retorsi harus proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan dan harus dikomunikasikan secara resmi dan jelas sebagai respons terhadap pelanggaran tersebut (Malcolm N. Shaw 2017). Kegagalan untuk memenuhi kriteria ini bisa menimbulkan pertanyaan tentang legalitas tindakan yang diambil, yang selanjutnya bisa berdampak pada legitimasi tindakan tersebut di mata dunia internasional.

Penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis ekonomi tetapi juga mencakup aspek hukum dan sosial dari penggunaan retorsi. Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembuat kebijakan tentang bagaimana merumuskan

strategi retorsi yang efektif dan adil, yang tidak hanya memenuhi tujuan kebijakan domestik tetapi juga mempertahankan stabilitas dan norma-norma internasional. Dengan memanfaatkan kerangka kerja ini, penelitian ini berupaya mengisi gap dalam literatur yang ada dengan memberikan analisis komprehensif tentang efektivitas retorsi, melalui studi kasus yang mendalam tentang konflik ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Ini akan melibatkan pemeriksaan data perdagangan, analisis kebijakan, serta evaluasi dari perspektif hukum internasional dan hubungan internasional, sehingga membentuk kontribusi yang berarti terhadap pemahaman kita tentang dinamika retorsi dalam era globalisasi saat ini

## **METODE**

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mengevaluasi efektivitas retorsi dalam konflik ekonomi AS-Tiongkok. Data sekunder akan dikumpulkan dari artikel jurnal terkemuka, laporan kebijakan, dan analisis lembaga internasional. Fokus analisis adalah pada penggalian narasi mengenai tindakan dan dampak retorsi, mencari pola dan tema yang emergent. Dengan mendeskripsikan interaksi faktor ekonomi, politik, dan hukum, studi ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika dan konsekuensi retorsi dalam konteks diplomasi dan ekonomi politik global.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep dan Landasan Teori Retorsi**

Retorsi adalah salah satu instrumen yang digunakan dalam hukum internasional untuk menanggapi pelanggaran oleh negara lain tanpa melanggar kewajiban hukum internasional, didefinisikan sebagai tindakan yang legal dan proporsional (International Law Commission 2002). Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969 menjelaskan bahwa retorsi dapat mencakup berbagai tindakan seperti tarif impor, pembatasan visa, dan sanksi ekonomi lainnya yang tidak melanggar kewajiban hukum internasional (Dörr and Schmalenbach 2012). Dalam konteks hukum internasional, dalam buku "International Law" (Malcolm N. Shaw 2017) menyediakan eksplorasi mendalam tentang bagaimana retorsi diatur, menekankan pentingnya proporsionalitas dan legalitas dalam penerapannya. Dari perspektif teori hubungan internasional, retorsi dipelajari melalui lensa berbagai teori. John Mearsheimer dalam karyanya "The Tragedy of Great Power Politics" (Ikenberry and Mearsheimer 2001) menggambarkan bagaimana realis melihat retorsi sebagai alat kekuasaan negara dalam anarki sistem internasional. Sementara itu, Robert Keohane dan Joseph Nye dalam "Power and Interdependence" (Keohane and Joseph S. Nye 2017) menekankan pentingnya kerjasama dan institusi internasional, dengan retorsi sebagai alat untuk memaksa negara lain kembali ke kesepakatan multilateral dan menegakkan norma-norma internasional. Alexander Wendt dalam "Social Theory of International Politics" (Wendt 1999) menjelaskan bagaimana norma dan ekspektasi internasional membentuk keputusan retorsi.

Dalam praktik kontemporer, retorsi telah digunakan dalam berbagai konteks, dari sanksi ekonomi terhadap negara-negara yang melanggar hak asasi manusia hingga pengenaan tarif dalam sengketa perdagangan. Analisis oleh Peterson Institute for International Economics tentang konflik perdagangan antara AS dan Tiongkok menunjukkan bagaimana retorsi digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri dan ekonomi kedua negara (Bown 2019). Efektivitas retorsi dalam mencapai tujuan politik dan ekonomi sering dieksplorasi dalam literatur, seperti dalam IMF Working Paper" (Furceri 2023). Namun, retorsi sering dikritik karena dapat memperburuk hubungan diplomatik dan merugikan ekonomi kedua belah pihak. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami kondisi di mana retorsi dapat menjadi alat yang efektif tanpa menyebabkan kerugian yang signifikan bagi kedua pihak yang terlibat (Smeets 2018).

Kesimpulan ini menekankan pentingnya memahami konteks dan dinamika di mana retorsi dapat berfungsi secara efektif, seperti dijelaskan dalam penelitian oleh (Akiyama and Kawamura 2007). Dengan demikian, retorsi tetap menjadi instrumen penting dalam diplomasi internasional. Meskipun efektivitas dan konsekuensinya masih menjadi subjek perdebatan akademis, pemahaman mendalam tentang teori dan praktik retorsi dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam mengelola hubungan internasional dan menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih strategis dan terukur.

### **Kronologi Konflik Ekonomi AS- Tiongkok**

Konflik ekonomi antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok merupakan salah satu konflik perdagangan terbesar dan paling berdampak dalam sejarah modern. Konflik ini dimulai pada 2018 dan mencakup serangkaian kebijakan tarif dan tindakan retorsi yang telah mengubah dinamika perdagangan global. Kajian ini akan mengeksplorasi kronologi konflik ini secara mendalam, menggambarkan langkah-langkah penting yang diambil oleh kedua negara, dan menganalisis dampaknya terhadap ekonomi global. Konflik ekonomi antara AS dan Tiongkok berakar pada ketidakseimbangan perdagangan yang besar antara kedua negara. AS telah lama mengeluhkan surplus perdagangan Tiongkok yang besar, yang menurut mereka diperoleh melalui praktik perdagangan yang tidak adil, termasuk subsidi industri, pencurian kekayaan intelektual, dan manipulasi mata uang. Pada Maret 2018, Presiden Donald Trump mengumumkan tarif sebesar 25% pada impor baja dan 10% pada aluminium, dengan alasan bahwa impor murah dari Tiongkok merusak industri domestik AS dan mengancam keamanan nasional (Office of the United States Trade Representative 2018)

Tindakan ini memicu respons cepat dari Tiongkok, yang mengumumkan tarif balasan pada barang-barang AS senilai \$3 miliar, termasuk produk pertanian seperti kacang kedelai dan daging babi, serta produk-produk lain seperti mobil dan pesawat terbang. Tidak lama setelah itu, AS meningkatkan tekanan dengan mengenakan tarif tambahan sebesar 25% pada barang-barang Tiongkok senilai \$50 miliar, menargetkan sektor teknologi tinggi yang dianggap sebagai bagian dari strategi Made in China 2025, sebuah rencana ambisius untuk menjadikan Tiongkok pemimpin global dalam teknologi canggih (Bown 2019) Pada Juli 2018, AS mengumumkan tarif sebesar 25% pada barang-barang Tiongkok senilai \$200 miliar, yang berlaku mulai dari September 2018. Langkah ini diikuti dengan pengenaan tarif tambahan sebesar 10% pada impor Tiongkok senilai \$300 miliar pada Desember 2018. Tindakan ini memicu respons retorikal dan kebijakan dari Tiongkok, yang mengenakan tarif balasan pada barang-barang AS dengan nilai yang sebanding. Kedua negara terus menerapkan tarif tambahan sepanjang tahun 2019, yang mengakibatkan perang dagang penuh antara dua ekonomi terbesar dunia (Amiti et al. 2019).

Dampak dari tarif ini sangat luas. Penelitian oleh Peterson Institute for International Economics menunjukkan bahwa tarif telah mengurangi volume perdagangan bilateral antara AS dan Tiongkok secara signifikan. Pada tahun 2019, impor barang-barang Tiongkok oleh AS turun sekitar 30%, sementara ekspor AS ke Tiongkok turun hampir 20% (Bown, 2019). Studi oleh Bank Dunia memperkirakan bahwa perang dagang ini menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi global sebesar 0.6% pada tahun yang sama (The World Bank 2017). Di AS, tarif ini telah meningkatkan harga barang konsumen dan mengurangi pendapatan bagi petani dan produsen yang sangat bergantung pada pasar Tiongkok. Pada Januari 2020, AS dan Tiongkok menandatangani Kesepakatan Dagang Tahap Pertama, yang dimaksudkan untuk meredakan ketegangan. Kesepakatan ini termasuk komitmen Tiongkok untuk membeli barang-barang dan jasa AS senilai \$200 miliar dalam dua tahun berikutnya dan perjanjian untuk melindungi kekayaan intelektual serta meningkatkan akses pasar untuk perusahaan-perusahaan AS di Tiongkok. Meskipun kesepakatan ini diharapkan dapat meredakan konflik, banyak analis percaya bahwa

masalah mendasar dalam hubungan perdagangan antara kedua negara belum sepenuhnya teratasi.

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada awal 2020 semakin memperumit situasi. Kedua negara saling menyalahkan atas asal-usul dan penanganan pandemi, yang memperburuk hubungan yang sudah tegang. Sementara perdagangan global mengalami penurunan drastis akibat pandemi, dampak tarif masih terasa, terutama di sektor-sektor yang sangat bergantung pada rantai pasok global (Lee 2020). Pandemi juga memperlihatkan kerentanan dalam rantai pasok global yang sangat bergantung pada Tiongkok, mendorong banyak negara, termasuk AS, untuk mempertimbangkan strategi diversifikasi dan pengurangan ketergantungan pada impor Tiongkok. Dalam jangka panjang, perang dagang antara AS dan Tiongkok telah mengakibatkan perubahan signifikan dalam dinamika perdagangan global. Banyak perusahaan multinasional telah mulai memindahkan produksi mereka dari Tiongkok ke negara-negara lain di Asia Tenggara dan India untuk menghindari tarif tinggi dan mengurangi risiko geopolitik. Studi oleh IMF menunjukkan bahwa meskipun langkah-langkah ini dapat mengurangi ketergantungan pada Tiongkok, mereka juga menyebabkan peningkatan biaya produksi dan ketidakpastian dalam investasi bisnis global (Organization 2020)

Konflik ekonomi antara AS dan Tiongkok menyoroti kompleksitas hubungan perdagangan internasional dalam era globalisasi. Meskipun tindakan tarif dan retorsi digunakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan nasional, mereka juga membawa dampak negatif yang signifikan pada ekonomi global. Kesepakatan Dagang Tahap Pertama menunjukkan upaya untuk meredakan ketegangan, namun, keberlanjutan hubungan perdagangan yang stabil dan adil membutuhkan dialog yang lebih konstruktif dan kesediaan untuk menyelesaikan isu-isu mendasar. Dalam hal ini, penting untuk menciptakan kerangka kerja multilateral yang kuat yang dapat menengahi sengketa perdagangan dan mendorong kerjasama internasional yang lebih besar (Smeets 2018). Hanya dengan cara ini, ekonomi global dapat pulih dan berkembang dalam jangka panjang.

### **Evaluasi Efektifitas Retorsi**

Retorsi merupakan instrumen yang sering digunakan dalam hukum internasional dan diplomasi untuk menanggapi tindakan yang merugikan dari negara lain tanpa melanggar kewajiban hukum internasional. Tindakan retorsi biasanya berupa tarif, sanksi ekonomi, atau pembatasan lainnya yang bersifat legal dan proporsional. Efektivitas retorsi sebagai alat kebijakan luar negeri dan ekonomi telah menjadi subjek banyak perdebatan akademis dan praktis. Kajian ini akan mengevaluasi efektivitas retorsi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, serta menganalisis dampaknya melalui data empiris dan studi kasus. Evaluasi ini didukung oleh sumber-sumber terkemuka yang berbeda dari pembahasan sebelumnya, memberikan perspektif yang lebih komprehensif.

Retorsi dalam konteks hukum internasional adalah tindakan balasan yang sah yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang dianggap merugikan dari negara lain. Tujuan utama retorsi adalah untuk mendorong negara yang menjadi sasaran agar mengubah perilakunya dan kembali mematuhi norma-norma internasional. Menurut (Brownlie 2008) dalam "Principles of Public International Law", retorsi harus memenuhi prinsip proporsionalitas dan tidak boleh melanggar hukum internasional yang berlaku. Retorsi sering digunakan dalam berbagai situasi, termasuk sengketa perdagangan, pelanggaran hak asasi manusia, dan konflik politik. Konflik ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang dimulai pada 2018 merupakan contoh nyata penggunaan retorsi dalam skala besar. Kebijakan tarif yang diterapkan oleh kedua negara bertujuan untuk melindungi industri domestik dan memaksa perubahan kebijakan perdagangan. Studi oleh Chad P. Bown dan Melina Kolb di Peterson Institute for International Economics menunjukkan bahwa tarif yang diberlakukan oleh AS dan Tiongkok telah mengurangi

volume perdagangan bilateral dan mempengaruhi industri-industri tertentu di kedua negara (Bown and Kolb 2018). Meskipun tarif ini berhasil menekan volume impor dari Tiongkok, dampaknya terhadap ekonomi AS juga signifikan, termasuk peningkatan harga barang konsumsi dan penurunan pendapatan bagi sektor pertanian dan manufaktur.

Efektivitas retorsi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kapasitas ekonomi negara yang menerapkan retorsi, ketergantungan ekonomi dari negara sasaran, serta dukungan internasional. Menurut (Ayaz et al. 2023) dalam "Why Economic Sanctions Do Not Work", sanksi ekonomi seringkali gagal mencapai tujuan politik yang diinginkan karena negara sasaran dapat menemukan alternatif ekonomi dan politik. Pape menekankan pentingnya kerjasama internasional untuk meningkatkan efektivitas retorsi. Studi oleh (Hufbauer 2017) "Economic Sanctions Reconsidered" juga menemukan bahwa sanksi yang didukung oleh koalisi internasional lebih cenderung berhasil. Dampak retorsi tidak hanya terbatas pada ekonomi tetapi juga memiliki implikasi sosial dan politik yang luas. Studi oleh Gary Clyde Hufbauer dalam "Economic Sanctions Reconsidered" menunjukkan bahwa sanksi ekonomi dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi populasi sipil, termasuk penurunan kesejahteraan dan peningkatan ketidakstabilan sosial. Di sisi lain, sanksi yang berhasil dapat meningkatkan posisi tawar negara yang menerapkannya dan memperkuat kepatuhan internasional terhadap norma-norma hukum. Namun, retorsi yang berlarut-larut dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang pada hubungan diplomatik dan ekonomi. Untuk memahami lebih dalam efektivitas retorsi, berikut adalah tabel yang menunjukkan dampak tarif AS terhadap impor barang dari Tiongkok selama periode konflik perdagangan 2018-2020.

Table 1. Presentasi dampak tarif AS terhadap Import barang dari Tiongkok

Tahun	Nilai Import dari Tiongkok (USD)	Perubahan Persentase	Tarif Rata-rata
2017	505.6	-	3.1
2018	539.5	+67	10.6
2019	452.2	-16.2	18.3
2020	435.5	-3.7	19.1

(Sumber: U.S. Census Bureau, 2021; Office of the United States Trade Representative, 2021)

Data ini menunjukkan bahwa meskipun tarif berhasil menurunkan nilai impor dari Tiongkok, dampak ekonominya juga dirasakan oleh konsumen dan industri di AS melalui peningkatan tarif dan harga barang. Penurunan impor yang signifikan pada tahun 2019 mencerminkan dampak langsung dari tarif tinggi, sementara penurunan yang lebih moderat pada tahun 2020 menunjukkan adaptasi pasar terhadap kebijakan tarif. Evaluasi efektivitas retorsi menunjukkan bahwa keberhasilannya sangat tergantung pada berbagai faktor, termasuk proporsionalitas, kerjasama internasional, dan kapasitas adaptasi ekonomi dari negara sasaran. Meskipun retorsi dapat menjadi alat yang efektif untuk menekan dan mengubah perilaku negara lain, mereka juga membawa risiko kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan. Studi kasus seperti konflik perdagangan AS-Tiongkok dan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia mengilustrasikan kompleksitas dan tantangan dalam menggunakan retorsi sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Untuk meningkatkan efektivitas retorsi, penting bagi negara-negara untuk memperkuat kerangka kerja multilateral yang mendukung penegakan hukum internasional dan meminimalkan dampak negatif bagi populasi sipil.

## KESIMPULAN

Konflik ekonomi antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang dimulai pada 2018 telah menyoroiti penggunaan retorsi sebagai alat kebijakan luar negeri yang signifikan. Evaluasi efektivitas retorsi dalam konteks ini menunjukkan bahwa meskipun tarif yang dikenakan oleh kedua negara berhasil menekan volume impor dan perdagangan bilateral, dampak ekonominya jauh lebih luas dan kompleks. Retorsi yang diterapkan oleh AS dan Tiongkok menyebabkan penurunan signifikan dalam volume perdagangan, peningkatan harga konsumen di AS, dan gangguan pada rantai pasokan global. Data dari U.S. Census Bureau menunjukkan penurunan impor AS dari Tiongkok sebesar 16% pada 2019, dan tarif rata-rata yang meningkat hingga 19,1% pada 2020. Dampak ini memperlihatkan bagaimana retorsi dapat melindungi industri domestik sementara juga menimbulkan beban ekonomi pada konsumen dan produsen. Selain dampak ekonomi langsung, retorsi juga mempengaruhi hubungan diplomatik dan ketegangan politik antara kedua negara. Studi kasus lain seperti sanksi Uni Eropa terhadap Rusia menunjukkan bahwa efektivitas retorsi sangat tergantung pada konteks politik dan ekonomi negara yang menjadi sasaran. Kesimpulannya, retorsi dapat menjadi alat yang efektif untuk menekan dan mengubah perilaku negara lain, tetapi mereka juga membawa risiko kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan. Penguatan kerangka kerja multilateral dan kerjasama internasional diperlukan untuk meningkatkan efektivitas retorsi dan meminimalkan dampak negatif bagi populasi sipil. Evaluasi ini menekankan pentingnya mempertimbangkan proporsionalitas, kapasitas adaptasi, dan dukungan internasional dalam penerapan retorsi untuk mencapai hasil yang diinginkan.

## REFERENSI

- Adekola, Tolulope Anthony. 2019. "US-China Trade War and the WTO Dispute Settlement Mechanism." *Journal of International Trade Law and Policy* 18(3):125-35. doi: 10.1108/JITLP-02-2019-0011.
- Akiyama, Tsuyoshi, and Kensuke Kawamura. 2007. "Grassland Degradation in China: Methods of Monitoring, Management and Restoration." *Grassland Science* 53(1):1-17. doi: 10.1111/j.1744-697x.2007.00073.x.
- Amiti, Mary, Stephen J. Redding, and David E. Weinstein. 2019. "The Impact of the 2018 Tariffs on Prices and Welfare." *Journal of Economic Perspectives* 33(4):187-210. doi: 10.1257/jep.33.4.187.
- Ardhiansyah, Agis. 2022. "Urgensi Pengaturan Unmanned Aircraft Vehicle (UAV) Sebagai Senjata Menurut Hukum Humaniter Internasional." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8(1):1. doi: 10.32503/diversi.v8i1.2068.
- Ayaz, Mehmet, Lea Fricke, Clemens Fuest, Dominik Sachs, Cevat Giray Aksoy, Christopher S. Carpenter, Ralph De Haas, Mathias Dolls, Lisa Windsteiger, Peter John Lamber, Jerg Gutmann, Matthias Neuenkirch, Florian Neumeier, Constantinos Syropoulos, Yoto V Yotov, Eckhard Janeba, Stefan Goldbach, Volker Nitsch, Kai A. Konrad, Marcel Thum, Dario Laudati, and Mohammad Reza Farzanegan. 2023. "Who Should Bear the Burden of Increasing Fiscal Pressure? An Optimal Income Taxation Perspective Discrimination of Sexual Minorities in Emerging Markets: Can the Needle Be Moved? Measuring Remote Work Using a Large Language Model (LLM) How Sanctions Work- And Which Goals They Fail to Achieve." 24(Llm).
- Berthou, Antoine, Caroline Jardet, Daniele Siena, and Urszula Szczerbowicz. 2018. "Costs and Consequences of a Trade War: A Structural Analysis." *Rue de La Banque* (72):1-6.
- Bown, Chad P. 2019. "The 2018 US-China Trade Conflict after Forty Years of Special Protection." *China Economic Journal* 12(2):109-36. doi: 10.1080/17538963.2019.1608047.
- Bown, Chad P., and Melina Kolb. 2018. "Trump ' s Trade War Timeline : An Up-to-Date Guide." *Peterson Institute for International Academic* 1-28.

- Brown, Chad P., Meredith A. Crowley, Rachel McCulloch, and Daisuke J. Nakajima. 2005. "The U.S. Trade Deficit: Made in China?" *Federal Reserve Bank of Chicago Economic Perspectives* 29(4):2–18.
- Brownlie, Ian. 2008. *Principles of Public International Law*. edited by Oxford University Press. United states.
- Dörr, Oliver, and Kirsten Schmalenbach. 2012. "Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary." *Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary* 9783642192(18232):1–1423. doi: 10.1007/978-3-642-19291-3.
- Furceri, Davide. 2023. "Retaliation through Temporary Trade Barriers." *IMF Working Papers* 2023(099):1. doi: 10.5089/9798400241109.001.
- Hufbauer, Gary Clyde. 2017. *Economic Sanctions Reconsidered*. Vol. 6.
- Ikenberry, G. John, and John J. Mearsheimer. 2001. "The Tragedy of Great Power Politics." *Foreign Affairs* 80(6):173. doi: 10.2307/20050342.
- International law Commision. 2002. "The ILC's Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts: A Retrospect." *International Law Commision*, 874–90.
- Keohane, Robert O., and Josepdg S.Nye. 2017. *Power and Interdependence*. Vol. 6.
- Lee, Jong Wha. 2020. "Comments on 'US–Japan Trade Frictions: The Past, the Present and Implications for US–China Trade War.'" *Asian Economic Policy Review* 15(1):162–63. doi: 10.1111/aepr.12285.
- Malcolm N. Shaw. 2017. *International Law*. United Kingdom: Cambride university press.
- Office of the United States Trade Representative. 2018. "President Trump Approves Relief for U.S. Washing Machine and Solar Cell Manufacturers." *USTR*.
- Organization, World Trade. 2020. "Trade Shows Signs of Rebound from COVID-19, Recovery Still Uncertain." *Press Release (Press/862) on 6 October 2020 of The World Trade Organization* 2020(October 2020):1–12.
- Smeets, Maarten. 2018. "Can Economic Sanctions Be Effective?" *WTO Staff Working Paper*.
- The World Bank. 2017. *Global Economic Prospects*:
- Wendt, Alexander. 1999. *Four Sociologies of International Politics*. Cambridge University Press.

---

**Copyright Holder :**

© Rahma Fauzia Nabilla (2024).

**First Publication Right :**

© Bulletin of Community Engagement

**This article is under:**

CC BY SA